# GUNUNGKIDUL-KULONPROGO

PONPES AL HIKMAH KARANGMOJO

# Persiapan PTM, Vaksinasi Santri Terapkan Prokes

WONOSARI (KR) -

Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hikmah Karangmojo melakukan persiapan menyambut Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Para santri yang kembali di Ponpes Al Hikmah sudah menjalani isolasi dan kini bertahap melaksanakan vaksinasi Covid-19. Selain itu, penerapan protokol kesehatan (prokes) juga telah dilaksanakan. "Jika aturan pemerintah nantinya sudah diperbolehkan PTM, tentu akan segera dilaksanakan. Karena segala persiapan sudah dilakukan mulai dari isolasi kedatangan santri, vaksinasi dan penerapan prokes," kata Pimpinan Ponpes Al Hikmah Karangmojo KH Harun Al Rasyid, Sabtu (18/9).

Pelaksanaan vaksinasi bekerjasama dengan puskesmas dan TNI/Polri. Jika nantinya sudah diperbolehkan maka santri akan mengikuti PTM sesuai jen-



KR-Dedv EW

KH Harun memantau santri di ruang perpustakaan.

jang pendidikan Sesuai aturan PPKM, orang tua juga tidak diperbolehkan menjenguk di ponpes. Nantinya menyesuaikan aturan dari pemerintah. Diungkapkan, Ponpes Al Hikmah kini sudah memiliki kantor utama di Al Hikmah 1 di Sumberjo, Karangmojo meliputi jenjang SMP, MA, SMK.

Sedangkan cabangnya meliputi Al Hikmah 2 di Branjang, Ngawis, Karangmojo khusus SD, Al Hikmah 3 di Nglorog, Nglipar SD hingga SLTA. Sedangkan Al Hikmah 4 berada di Wonolagi, Purwosari. Juga telah diresmikan cabang Al Hikmah di Boyolali, Minggu (19/9). "Ponpes Al Hikmah kini juga menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Wonosari. Berupa pembekalan pendidikan agama dan keterampilan bagi mantan narapidana yang akan kembali di masyarakat," jelas-

### MASIH BANYAK YANG BINGUNG Disbud Gelar Bimtek 'Ngadi Busana'



KR-Dedy EW

Wabup Heri Susanto memberikan sambutan.

WONOSARI (KR) - Masih banyaknya mewaan dihadiri Wakil Bupati Gumasyarakat yang belum mengetahui tentang aturan penggunaan busana Yogyakarta, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Gunungkidul menggelar bimbingan teknis (bimtek) di RM Nilasari Siyono, Playen. Kegiatan Bimtek 'Ngadi Busana' diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Bimtek ini dalam rangka memberikan contoh yang benar. Bagaimana memakai yang ada. Karena selama ini banyak yang belum tahu mana yang boleh dipergunakan dan dilarang," kata Kabid Warisan Budaya Agus Mantara MM, Sabtu

Kegiatan yang didukung dana keisti-

nungkidul Heri Susanto MM dan undangan. Diungkapkan, bimtek sebelumnya juga telah menyasar organisasi kemasyarakatan dan komunitas. Nantinya akan diteruskan hingga menyasar di tingkat kalurahan. Peserta mengikuti teori dan praktik. Mulai dari pengenalan jenis kain dan mana yang diperbolehkan untuk dipakai.

Bagaimana cara menggunakan hingga busana Yogyakarta sesuai dengan aturan cara berjalan maupun bertingkah laku. Sementara itu Wabup Heri Susanto memberikan apresiasi penyelenggaraan bimtek. Karena merupakan upaya untuk mengetahui secara benar berkait dengan penggunaan Busana Yogyakarta.

# MCCC Kalibawang Gelar Vaksinasi

KALIBAWANG (KR) -Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Kalibawang melaksanakan kegiatan vaksinasi massal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo, Sabtu (18/9), di Embung Krapyak Kalibawang. Vaksinasi massal tersebut disediakan 1.500 Vaksin.

Dalam program ini MCCC Kalibawang menggandeng beberapa stakeholder diantaranya MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MDMC Kabupaten Kulonprogo, RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, Puskesmas Kalibawang, Koramil 05 Kaliba-

wang, Polsek Kalibawang, dan SMK Muhammadiyah Kalibawang. Hadir dalam kegiatan itu MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bupati Kulonprogo, serta jajaran Kapanewon Kalibawang.

Dikatakan Purwanto Ketua MCCC Kalibawang, tujuan dari program ini adalah MCCC Kalibawang peduli membantu pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dalam percepatan Vaksinasi. Harapannya dengan program vaksinasi massal ini dapat segera menekan angka penularan Covid-19 dan dengan akhirnya pandemi ini segera berakhir.

### Implementasi Model Kota Tanpa Pungli

WATES (KR) - Pemberantasan pungutan liar (pungli) pada semua sektor pelayanan publik memiliki tantangan besar. Diperlukan inovasi penerapan strategi pencegahan pungli melalui kebijakan implementasi model kota

tanpa pungli. Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo mengatakan, pemasangan baliho merupakan ajakan pada semua pihak memerangi pungli atau meniadakan pungli di semua lini kehidupan masyarakat. Baik di lingkungan instansi pemerintah maupun di lembagalembaga dan juga di kehidupan sehari-hari. Apabila pungli dibiarkan menjadi budaya tidak baik.

"Harapannya, kita berdari pungutanpungutan liar. Itu garis besarnya," tegas Sutedjo bersama Satuan Tugas Sapu Bersih (Sat-Saber) dan Forkompimda Kulonprogo meresmikan baliho pungli di dekat pintu perlintasan kereta api atau teteg Wetan dan teteg Kulon, Wates, Jumat (17/9).

Pemasangan baliho 'Kulonprogo Menuju Kabupaten Bebas Pungli' merupakan media ajakan kepada masyarakat agar menghindari dan meniadakan pungutan liar. Peran seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan agar bisa bersama-sama memerangi pungli.

Sementara itu, Ketua Satgas Saber Pungli sekaligus Wakapolres Kulonprogo Kompol Sudarmawan mengingatkan semua pihak menghentikan tindakan pungli.

Ke depan Satgas Saber Pungli akan melakukan penyuluhan sekaligus mengimbau instansi pemerintah dan swasta agar tidak melakukan praktek pungli. Upaya-upaya preventif akan terus dilakukan dan langkah penegakan hukum menjadi langkah terakhir apabila masih terdapat pungli. Kabupaten bebas pungli membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama pada masa pandemi seperti sekarang.

"Melalui pemasangan baliho, Satgas Saber Pungli mencanangkan Kabupaten Kulonprogo bebas pungli," ujarnya.

Pungli merupakan kegiatan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungli termasuk tindakan ilegal dan masuk kategori korupsi. Praktik-praktik pungli hingga kini masih marak terjadi bahkan seolah-olah telah menjadi budaya. Karena itu upaya pemberantasan dilakukan dengan menyebarkan informasi ke berbagai kalang-(Rul)-f

# Hajatan Pernikahan Dibubarkan

LANGGAR PERATURAN PPKM

WONOSARI (KR) - Jajaran Kepolisian Sektor Playen membubarkan hajatan yang dihelat di Gedung Olah Raga (GOR) Siyono, Playen, Gunungkidul. Hajatan pernikahan tersebut terpaksa dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan dengan jumlah undangan melebihi dari ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Kapolsek Playen, AKP Hajar Wahyudi mengatakan, dari pihak Wedding Organizer (WO) sebelumnya sudah melayangkan surat izin kepada Gugus Tugas Kapanewon Playen jika hendak menggelar hajatan di GOR Siyono. Gugus Tugas Kapanewon Playen sendiri sudah memberikan penjelasan sesuai dengan Instruksi Bupati perpanjangan PPKM pada Level 3. "Sesuai ketentuan hajatan boleh dilakukan namun dengan jumlah tamu maksimal 20 orang,"

katanya, Minggu (19/9).

Saat hari pelaksanaan pihaknya mendapatkan laporan masyarakat jika tamu undangan yang datang melebihi ketentuan. Bahkan jumlah tamu mencapai ratusan orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

Pihaknya kemudian mendatangi lokasi hajatan dan berdasarkan pantauannya di lapangan tamu undangan yang datang hingga pukul 13.30 WIB terus berdatangan dan saat resepsi berlangsung

jumlah tamu undangan semakin banyak dan berkerumun

"Kami lakukan komunikasi kepada pihak penanggung jawab acara untuk membubarkan dan menghentikan pesta ini," imbuh Kapolsek Playen.

Sebagaimana instruksi bupati sendiri PPKM Level 3 di Gunungkidul diperpanjang hingga 20 September 2021. Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar dan menaati aturan pemerintah. Sebenarnya pihaknya juga sudah mengedukasi kepada penyelenggara hajatan agar membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penularan covid-19. Tetapi ternyata dilanggar dan tidak memiliki komitmen untuk patuh dengan aturan yang berlaku. Sekitar 30 menit berselang, pihak penanggung jawab bersama WO kemudian sepakat untuk menghentikan acara.

Para tamu dan penyelenggara hajatan bisa memahami kondisi saat ini, terlebih hajatan tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Kami berharap kepatuhan masyarakat terhadap aturan harus dilakukan selama pandemi Covid-19 saat ini," te-(Bmp)-f

# Banyak Petani Butuhkan 'Alsintan'

Kulonprogo Drs H Sutedjo meminta kelompok tani merawat dan menggunakan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang diberikan dari pemerintah. Alsintan tersebut diharapkan dapat meringankan pekerjaan petani dan meningkatkan produksi panenan pertanian.

Drs H Sutedjo mengungkapkan masih banyak kelompok tani membutuhkan Alsintan. Khususnya Alsintan untuk pengolahan lahan seperti traktor. Setiap menjelang musim tanam, petani harus antre yang berdampak jadwal menanam tertunda.

Bupati Kulonprogo menyerahkan bantuan traktor roda dua, traktor kecil atau cultivator dan kendaraan roda tiga dari Di-

WATES (KR) - Bupati rektorat Jenderal (Dirjen) Hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan) di Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulonprogo, Jumat (17/9).

Sebanyak 12 kelompok tani yang menerima bantuan Alsintan menyatakan kesanggupannya untuk menggunakan dan merawat Alsintan untuk meringankan pekerjaan pengolahan lahan anggota kelompok petani.

Kelompok tani penerima bantuan traktor roda dua, meliputi Kelompok Tani Sri Rejeki (Karangwuluh), Sido Makmur (Seworan), Ngudi Rejeki (Tuksono), Tani Makmur (Tuksono) dan Kelompok Tani Sido Maju (Tawangsari).

Penerima cultivator masing-masing Kelompok Tani Siap Karya (Plumbon), Ngudi Rejeki (Plum-



Bupati Kulonprogo didampingi Kepala DPP menyerahkan bantuan Alsintan traktor kepada kelompok tani di DPP Kulonprogo.

bon), Makarti (Karangwuni), Tani Jaya (Sogan), Tani Mulyo (Jogahan) dan Kelompok Tani Ngudi Makmur (Kanoman).

Sedangkan Kelompok Wonotoro Gisik tani (Bugel) menerima bantuan kendaraan roda tiga. "Kendaraan roda tiga untuk mengangkut cabai dan panenan hortikultura dari

Kapoires Kulonprogo,

lahan pertanian ke pasar lelang," ujar Muh Aris Nugroho, Kepala DPP Kulonprogo.

Menurutnya, traktor masih menjadi salah satu kendala bagi sebagian petani. Keterbatasan kepemilikan traktor, mengalami keterlambatan pengolahan lahan karena harus antri. (Ras)-f

#### TINDAK PERDAGANGAN ANJING ILEGAL

## Polres Kulonprogo Terima Penghargaan DMFI

**WATES (KK) -** Jajaran Polres Kulonprogo menerima penghargaan dari Dog Meat Free Indonesia (DM-FI) di Aula Bhara Daksa Polres setempat, Jumat (17/9). Penghargaan tersediberikan prestasinya dalam menindak perdagangan anjing secara ilegal pada awal Mei 2021.

Direktur DMFI, Lola Webber mengatakan, penanganan kasus perdagangan anjing ilegal atau tanpa dilengkapi surat keterangan sehat baru pertakali, yakni

Kulonprogo. Pemberian penghargaan ini sebagai upaya menyadarkan masyarakat terhadap bahaya transmisi penyakit rabies

melalui hewan anjing. "Ke depan, diharapkan perkara perdagangan anjing ilegal seperti ini tidak terjadi lagi. Terhadap pelaku perdagangan anjing ilegal yang diamankan Polres Kulonprogo, pihaknya berharap bisa mendapatkan hukuman yang setimpal karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat di Indonesia," katanya.

AKBP Muharomah Fajarini mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan DMFI. Penghargaan ini menjadi motivasi tersendiri bagi jajaran Polres Kuloprogo. Ke depan, pihaknya akan lebih optimal lagi dalam menyikapi perdagangan hewan, khususnya anjing. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat apabila mengetahui adanya upaya perdagangan anjing bisa menginformasikan kepada pihak berwajib.

Kasus perdagangan an-

jing ilegal ini diungkap ja jaran Polres Kulonprogo pada saat penyekatan giat Operasi Ketupat Progo 2021 di Pos Pengamanan (Pospam) Temon, Kamis (6/5) lalu.

menemukan Petugas kendaraan yang membawa 78 ekor anjing dari Garut dengan tujuan ke Solo. Puluhan ekor anjing ini tidak disertai surat keterangan dan rencana akan dijual untuk diambil dagingnya. Polisi mengamankan Sug (50) dan Srd (78) sebagai tersangka.

(R-2)-f

### PENANGANAN COVID-19 JADI PRIORITAS

### BLT Masih Diberikan Hingga Tahun 2022 WONOSARI (KR)

Penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi

di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi fokus utama program anggaran pemerintah. Kebijakan ini berlaku di seluruh tataran pemerintahan dengan pemanfaatan Dana Desa pada tahun anggaran 2022 mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Sujarwo MSi didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Subiyantoro sesuai dengan Permendes, penggunaan Dana Desa tahun 2022 masih untuk penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, peningkatan Badan Usaha Milik Desa atau Kalurahan (Bumdes).

"Untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang serta penanganan atau pencegahan stunting," katanya, kemarin.

Diakunya dalam Permendesa hingga saat ini belum ada ketentuan detail berapa persentasi untuk setiap bidang dan hal ini akan menjadi gambaran pemkab dan kalurahan terkait dengan penyusunan perencanaannya.Termasuk mengenai besaran dana desa yang akan diperoleh. Sehingga pihaknya belum mengetahui secara pasti nantinya alokasi untuk kalurahankalurahan di Gunungki-

Permendesa yang sudah diterbitkan baru sebatas penggunaan prioritas dana desa saja. "Terkait detail anggaran dan persentasi pemanfaatannya, nanti akan masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," katanya.

Sebagai gambaran saja, tahun 2020 lalu Kabupaten Gunungkidul mendapatkan dana desa sebesar Rp 142 miliar. Kemudian tahun 2021 ini, 144 kalurahan di Gunungkidul mendapatkan transfer dana desa sebesar Rp 144,2 miliar.

Adapun besaran anggaran yang diterima masing-masing kalurahan pun berbeda disesuaikan dengan kebutuhan kalurahan yang dilihat dari beberapa indikator. Saat ini untuk pencairan Dana Desa untuk kalurahan mandiri sudah selesai seluruhnya. Sementara untuk kalurahan reguler untuk termin ketiga baru 9 kalurahan yang mencairkannya. (Bmp)-f

3.525

3.975

2.275



3.325

3.675

Mulia "MULIA"

2.125 YUAN Menerima hampir semua mata uang asing

MYR

SAR